



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Didorong Laporkan Kejanggalan Pembebasan Lahan ke KPK

Harga tanah yang dibebaskan di sekitar Ciliwung hampir lima kali lipat dari nilai jual obyek pajak.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempersilakan pemerintah DKI melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi jika menemukan indikasi korupsi dalam pembebasan lahan untuk normalisasi kali. Menurut dia, pelaporan ke KPK akan membuat indikasi korupsi itu menjadi jelas.

“Jangan mengandai-andai, menganalisis, seakan-akan ada hal enggak betul di SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” kata Prasetyo di gedung DPRD Jakarta, kemarin.

Pengadaan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung terganjal ulah para pemain tanah. Mereka diduga mendapat bocoran informasi lebih awal dari orang dalam Dinas Sumber Daya Air Jakarta tentang lokasi lahan yang akan dibebaskan. Berbekal informasi itu, mereka bisa membuat perjanjian yang merugikan para pemilik tanah, jauh sebelum pemerintah DKI membayarkan uang pembebasan lahan.

Kejanggalan, misalnya, terlihat dalam pembebasan lahan milik Badruzaman dan tetangganya di Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Badruzaman, pemilik lahan seluas 654 meter persegi, lebih dulu mengikat perjanjian untuk menjual tanahnya Rp 900 ribu per meter persegi kepada seorang pemain tanah. Sebagai tanda jadi, Badruzaman menerima uang muka Rp 10 juta.

Mereka membuat perjanjian pada 23 Agustus 2017. Salah satu poin perjanjian menyebutkan, jika dalam proses pelunasan terdapat gugatan dari pemilik tanah mengenai harga yang telah disepakati, pembeli akan mempidanakan pemilik tanah.

Badruzaman terkaget-kaget ketika mengetahui bahwa tanahnya dihargai Rp 4,5 juta per meter persegi oleh pemerintah DKI. Dia baru tahu harga resmi pemerintah itu ketika diundang Panitia Pengadaan Tanah DKI pada Desember 2017. Karena ada masalah tersebut, pemerintah DKI menunda pembayaran sebagian lahan.

Sumber *Tempo* yang mengetahui proses pengada-

an lahan itu menuturkan, penetapan harga tanah oleh kantor jasa penilai publik (KJPP) juga janggal. Sumber ini mencontohkan, nilai jual obyek pajak (NJOP) di sekitar Ciliwung, Gedong, pada 2017 adalah sekitar Rp 1,03 juta per meter persegi. Namun KJPP, yang ditunjuk pemerintah DKI, menetapkan kisaran harga tanah di pinggir Ciliwung saat itu Rp 4,5 juta per meter persegi.

Taksiran harga dari KJPP itulah yang menjadi dasar bagi Dinas Sumber Daya Air dalam memberikan ganti rugi bagi pemilik lahan pada 2017. “Itu lahan mati, dijadikan bangunan juga enggak bisa, tapi harga tanahnya hampir lima kali lipat dari NJOP,” ujar pejabat di lingkungan pemerintah DKI itu.

Menurut Prasetyo, jika indikasi kecurangan bermula dari taksiran KJPP, pemerintah DKI sebaiknya mencari lembaga penilai lain. “Cari *appraisal* baru kan bisa,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mencatat semua sengkabut dalam pengadaan lahan ini. Pemerintah DKI, kata dia, juga akan

memperbaiki sistem pengadaan lahan. “Saya sekarang mau semua pembayaran tanah dilakukan secara *cashless transfer*,” ujar dia.

Sejauh ini, serapan anggaran Dinas Sumber Daya Air baru 29,9 persen. Rendahnya serapan anggaran itu salah satunya disebabkan oleh terhambatnya pembebasan lahan pengadaan tanah. Berdasarkan catatan *Tempo*, dari Rp 1,83 triliun anggaran untuk pembebasan lahan tahun ini, Dinas baru menggunakan sebesar Rp 373,3 miliar.

Anies lebih memilih serapan anggaran pengadaan tanah rendah daripada harus membayar pembelian lahan secara tunai. Sebab, pembelian tanah secara tunai rawan penyelewengan.

● JULNIS FIRMANSAH | RYAN DWIKI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Didorong Laporkan Kejanggalan Pembebasan Lahan ke KPK

Modus Curang yang Berulang

DUGAAN keterlibatan orang dalam Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam kongkalikong pengadaan lahan tidak hanya mencuat saat ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI pernah menemukan kejanggalan serupa saat mengaudit pengadaan lahan untuk pembangunan Waduk Pondok Ranggon III, Cilangkap, Jakarta Timur.

"Pembebasan tanah Waduk Pondok Ranggon III yang dilakukan oleh Dinas Tata Air (kini Dinas Sumber Daya Air) pada 2016 senilai Rp 32,009 miliar tidak dapat diyakini kewajaran harganya," demikian tertulis dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 itu. Berikut ini rincian temuan BPK tersebut:

- ▶ Nama yang tercantum dalam peta bidang tanah berbeda

dengan nama penduduk yang menerima ganti rugi. Pada akhir 2013, terjadi jual-beli antara pemilik lama 24 bidang tanah, sesuai dengan girik, dan pemilik baru yang namanya tercantum dalam daftar pembebasan lahan oleh Dinas. Nilai transaksi jual-beli tanah itu sebesar Rp 500 ribu per meter persegi. Pemilik lama menjual tanah mereka sejak 2012 sampai 2013 dengan harga sekitar Rp 150 ribu per meter persegi.

- ▶ Transaksi jual-beli itu bukan antara pemilik lama dan pemilik baru lahan. Pemilik lama menjual tanahnya melalui makelar berinisial Jml, bekas pekerja harian lepas di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Air. Pemilik lama juga tidak mengetahui bahwa di lokasi tanah mereka bakal dibangun

Waduk Pondok Ranggon III.

- ▶ Dinas Sumber Daya Air tak melakukan sosialisasi tentang pembebasan lahan kepada masyarakat untuk pembangunan Waduk Pondok Ranggon III.
- ▶ Pejabat pengadaan tanah lalai dalam penunjukan kantor jasa penilai publik (KJPP) berinisial KMP. Sebab, KMP membantah menerbitkan laporan harga *appraisal* untuk ganti rugi tanah yang bakal dibangun Waduk Pondok Ranggon III itu. KMP juga tak pernah meneken kontrak dengan Dinas untuk menaksir harga lahan. Ternyata, yang menaksir harga lahan adalah USA dengan mencatat nama KJPP KMP.

SUMBER: LHP BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DKI TAHUN ANGGARAN 2016

● GANGSAR PARIKESIT